

Jokowi Sebut Debat Pilpres Boleh Saling Serang, Tapi Terkait Kebijakan

SERANG (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, debat pemilihan presiden (pilpres) sebaiknya diformat lebih baik lagi ke depannya. Tidak masalah antar paslon saling serang, asalkan menyoal kebijakan, visi dan misi.

"Debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu sehingga (berlangsung) hidup. Saling menyerang enggak apa-apa tapi (soal) kebijakan, *policy*, visinya yang diserang," ujar Jokowi dalam keterangan pers di Serang, Banten, Senin (8/1).

"Bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal saya kira enggak perlu. Enggak, enggak baik, tidak mengedukasi," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga memberikan pendapatnya soal pelaksanaan debat ketiga Pilpres 2024 yang dilaksanakan pada Minggu (7/1) malam.

Kepala Negara menilai debat semalam kurang menampilkan substansi dan visi para calon presiden (capres). Presiden pun menyoro soal saling serang antar capres dalam debat tersebut.

"Yang pertama, saya memang melihat, substansi

dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya enggak apa-apa, asal (itu soal) kebijakan. Asal *policy*. Asal visi ya enggak apa-apa," jelas Jokowi.

"Tapi kalau yang sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam, mengenai apa hubungan internasional, mengenai geopolitik, dan lain-lain saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton," tuturnya.

Sehingga menurut Presiden, kemungkinan ada banyak orang kecewa dengan jalannya debat pada Minggu malam. Adapun debat ketiga Pilpres 2023 pada Minggu malam diikuti oleh calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Debat digelar di Istana Senayan, Jakarta dengan mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik. ● han

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



MKMK Permanen Diharapkan Tidak Hanya Hukum Hakim, Tapi Kembalikan Marwah MK

Tiga anggota MKMK permanen diharapkan tidak hanya menghukum hakim saja, tapi harus bisa mengembalikan marwah MK yang kini terpuruk.

JAKARTA (IM) - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo berharap Majelis Kehormatan MK (MKMK) yang secara resmi bertugas mulai Senin (8/1) tidak hanya menghukum hakim konstitusi, tapi juga berperan mengembalikan marwah Mahkamah.

"Majelis Kehormatan MK di dalam benak publik hanya sebagai lembaga pengawas para hakim, yang ketika ada laporan ditindaklanjuti dan ketika laporan itu bisa dibuktikan, kemudian dijatuhkan punishment," kata Suhartoyo setelah penguapan sumpah tiga anggota MKMK.

"Memang di satu sisi sebagai pengawas, di sisi lain harus memberikan terjemahan-terjemahan kepada publik bahwa MKMK akan dan sudah

memulai melakukan perubahan yang sekiranya memang perlu dilakukan dan kemudian mempertahankan yang sudah baik di MK," ujarnya.

Dengan demikian maka sorotan negatif yang selama ini terarah ke MK dapat berangsur pulih seiring dengan pulihnya reputasi Mahkamah dan para hakim. Suhartoyo meyakini bahwa tiga anggota MKMK permanen yang dilantik merupakan sosok yang tepat dan integritasnya telah teruji.

"Saya kira esensinya adalah secara kelembagaan kami MK sangat mengharapkan Bapak-bapak bertiga independen, imparial," kata Suhartoyo.

MKMK permanen ini beranggotakan I Dewa Gede Palguna dari unsur tokoh masyarakat, Yuliantri dari unsur

unsur akademisi/pakar hukum, dan Ridwan Mansyur dari unsur hakim konstitusi aktif.

Pemilihan ketiganya berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang digelar sembilan hakim konstitusi bulan lalu. Ketiganya dianggap memiliki integritas, jujur dan adil, berusia paling rendah 60 tahun, dan berwawasan luas. Dari tiga anggota MKMK, Palguna sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua MKMK yang saat itu masih bersifat *ad hoc* ketika mengadili dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi Guntur Hamzah.

Ketiga anggota MKMK akan bekerja untuk masa jabatan satu tahun setelah dilantik. Selanjutnya, MKMK permanen akan dibantu oleh Sekretariat MKMK yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal MK pada 24 Oktober 2023.

Pembentukan MKMK permanen ini sebenarnya telah dicanangkan sejak lama, tetapi tak kunjung terlaksana selama Anwar Usman menakhodai

MK. Sebelumnya, isu etik di lingkungan MK sampai membuat lembaga yang lahir dari rahim Reformasi ini dijuluki "Mahkamah Keluarga" oleh publik, menyusul pelanggaran berat kode etik yang dilakukan eks Ketua MK Anwar Usman terkait uji materi perkara nomor 90/PUU-XXI/2023.

Putusan uji berkaitan dengan syarat usia minimum calon wakil presiden yang akhirnya membukakan jalan bagi putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming, menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto.

Kemudian, MKMK yang dipimpin Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa ipar

SIDANG PUTUSAN HARIS DAN FATIA

Terdakwa Direktur Lokataru Haris Azhar (kanan) dan mantan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti (kiri) melakukan selebrasi ke pendukungnya usai sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (8/1). Majelis Hakim PN Jaktim menyatakan terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti tidak bersalah atau tidak mencemarkan nama baik Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.



KUNJUNGAN MAHFUD MD KE INDRAMAYU Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD (tiga kanan) menerima cenderamata saat pertemuan dengan Pemuda Gama Pantura di Indramayu, Jabar, Senin (8/1). Mahfud menghadiri deklarasi dukungan dari Pemuda Gama Pantura kepada pasangan Ganjar - Mahfud pada Pilpres 2024.

Menurut Hakim Istri Rafael Alun Tidak Patut Jika Ikut Dihukum

JAKARTA (IM) - Majelis hakim menyatakan istri mantan Pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo, Ernie Meike Torondek, tidak patut dihukum dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat suaminya. Hakim menyebut Ernie dalam posisi lemah di kasus ini.

"Bahwa mengenai nama Ernie Meike Torondek istri terdakwa sebagai pemegang saham dan sebagai komisaris utama PT ARME sesuai keterangan saksi Uceng Arsatoko, Direktur Utama PT ARME dan Rani Anindita Trenggani, Direktur Keuangan, semuanya menerangkan Ernie Meike Torondek tidak pernah ikut rapat pemegang saham maupun rapat pengurus perseroan. Yang selalu aktif memimpin rapat pe-

megang saham dan mengambil keputusan adalah terdakwa," kata hakim saat persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/1).

Hakim mengatakan nama Ernie Meike hanya tercatat di perusahaan PT ARME. Hakim mengaitkan operasional perusahaan PT ARME dijalankan oleh Rafael Alun.

Hakim menilai Ernie Meike tidak memiliki peran di perusahaan. Hakim menilai Ernie tidak patut bertanggung jawab secara hukum terkait gratifikasi yang diterima Rafael Alun.

Rafael Alun Trisambodo dinyatakan bersalah menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Rafael divonis 14 tahun penjara dan denda Rp 500 juta. ● mei

Cawapres Cak Imin Siap Dituntut jika Tidak Merealisasi Janji Kampanye

LAMPUNG (IM) - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, menyatakan, dirinya bersama calon presiden (capres) Anies Baswedan siap dituntut oleh rakyat jika tidak melaksanakan janji kampanye yang disampaikan dalam masa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal ini disampaikan pria yang karib disapa Cak Imin itu saat kampanye di hadapan ribuan warga Lampung Timur, Senin (8/1). Cak Imin mengatakan, janji kampanye yang disampaikan telah melalui perencanaan dan kajian untuk bisa dilaksanakan jika terpilih.

"Kalau perencanaan itu enggak terlaksana ya tuntutan saja kami, demo sebanyak-banyaknya, kami diingatkan," kata Cak Imin saat ditemui di Lapangan Merdeka, Lampung Timur, Senin (8/1) siang.

"Insyallah konsep

yang kami rencanakan sudah diuji dengan tim ekonomi yang bagus dan insya Allah layak dilaksanakan," ucapnya.

Cak Imin menjelaskan, janji-janji yang disampaikan kepada masyarakat saat kampanye bukan sekadar rayuan-rayuan untuk memilih pasangan Anies-Muhaimin (Amin) pada Pilpres 2024. Namun, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengklaim, seluruh janji pasangan Amin telah melewati tahap perencanaan yang mendalam.

"Ada yang protes, 'Kok Pak Muhaimin dan Mas Anies banyak janjinya? Ya kita bukan janji, namanya juga calon, ya menyiapkan konsep kepemimpinan yang akan datang, ya harus ada perencanaannya,'" kata Cak Imin. ● mei

Cawapres Gibran Janjikan Pemerataan, Pembangunan tak Hanya Fokus di Jawa

JAKARTA (IM) - Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menjanjikan pemerataan pembangunan. Ia menegaskan hal tersebut di hadapan para raja Maluku.

"Kita ingin ada pemerataan pembangunan. Pembukaan akses baru, konektivitas, karena Maluku ini kepulauan. Jadi kita ingin ada titik pertumbuhan ekonomi baru. Jadi tidak hanya di Jawa," ujar Gibran dalam keterangannya, Senin (8/1).

Pemerataan pembangunan tersebut saat ini sudah dimulai. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur salah satu contohnya.

"Saat debat yang lalu saya katakan investasi yang ada di luar Pulau Jawa sudah di angka 53 persen. Jadi sudah mulai ada pemerataan. Sekarang (juga) ada IKN, IKN simbol pemerataan pembangunan. Kita pengen nanti yang ada di Maluku ini tersentuh," kata Gibran.

Gibran menilai bahwa Maluku memiliki banyak sekali potensi, mulai dari pariwisata, kelautan, hingga hasil bumi. Khusus terkait kelautan, Gibran menegaskan akan melakukan hilirisasi perikanan.

"Kita tidak mau lagi mengirim barang mentah. Kita pengen ada pabrik pengolahan. Cold storage gede, bisa menyimpan produk-produk dalam jangka waktu lama. Dan nanti turunan dari produk-produk ikan akan menyelesaikan masalah di sektor lain," katanya.

Terkait dengan masalah hukum adat yang sempat ditanyakan oleh salah seorang raja, Gibran mengatakan pihaknya sedang melakukan koordinasi dengan tokoh-tokoh adat. Ia menekankan masalah peningkatan SDM di daerah-daerah, salah satunya dengan berinvestasi pada anak-anak Indonesia melalui program makan siang gratis.

"Kita sedang siapkan beberapa solusi, termasuk masalah sertifikasi, redistribusi kepemilikan tanah. Lalu bagaimana nanti kita menyelesaikan masalah mafia tanah," katanya.

"Saat ini investasi yang terbaik itu adalah investasi pada anak-anak. Kita ingin program makan siang gratis ini bisa terlaksana. Karena menurut kami ini bukan pengeluaran anggaran. Namun sebuah investasi menuju Indonesia Emas 2045. Kesempatan ini datang sekali dan takkan terulang lagi," katanya.

Gibran mengatakan, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran akan memberikan atensi khusus untuk daerah-daerah yang belum maksimal menikmati pemerataan pembangunan.

"Nanti akan lebih kami berikan atensi khusus. Terutama di Maluku ini. Sekali lagi, kita pengen tidak lagi fokus di Jawa saja. Kita pengen ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru," katanya. ● han



CAWAPRES MUHAIMIN KAMPANYE DI LAMPUNG

Cawapres nomor urut satu Muhaimin Iskandar berkampanye di hadapan ibu-ibu dari sejumlah majelis taklim di Lampung Timur, Lampung, Senin (8/1). Dalam kesempatan tersebut Muhaimin mensosialisasikan janji-janji politik serta visi misinya sebagai sekaligus menyerap aspirasi masyarakat setempat.

Marak Penipuan di WA, Mahfud MD Minta OJK Atur Penyebaran Informasi Perbankan

JAKARTA (IM) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang juga menjadi calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat kebijakan yang mengatur penyebaran informasi perbankan demi melindungi masyarakat dari penipuan dan peretasan. Seab belakangan ini banyak penipuan lewat WhatsApp.

Menko Polhukam bulan Desember lalu telah mengirimkan surat rekomendasi tentang penyebaran informasi perbankan dan jasa keuangan melalui kanal yang aman sesuai peraturan perundang-undangan, kepada OJK.

"Masyarakat harus dilindungi dari penipuan dan peretasan melalui WhatsApp. Sudah waktunya OJK membuat kebijakan agar pelaku usaha perbankan dan perusahaan jasa keuangan agar menggunakan SMS untuk promosi, notifikasi, dan OTP," kata Mahfud di Jakarta, Senin (8/1).

Mahfud mengaku sudah mendapat analisis dari Deputi VII Bidang Kominfortur Kemenko Polhukam, dan sudah ada rapat koordinasi kementerian/lembaga terkait. Ia berharap, masyarakat memiliki keamanan dan kenyamanan dalam beraktivitas di ruang digital.

"Kalau sampai berdampak ke transaksi keuangan, jangan sampai masyarakat dirugikan, apalagi terdapat kerugian finansial," ujar Mahfud.

Dalam surat rekomendasi yang ditandatangani 18 De-

seMBER 2023, Menko Polhukam menyoro penyelenggara social messaging tidak memiliki pusat pelayanan pelanggan. Sehingga, masyarakat yang mengalami, penipuan dan peretasan tidak mengetahui ke mana mereka harus melakukan pengaduan dan laporan.

Hal ini membuat aparat penegak hukum mengalami kesulitan melakukan penyelidikan. Tidak adanya kerja sama antara penyelenggara WhatsApp dengan operator telekomunikasi, sehingga akun pengguna WhatsApp tidak terhubung dengan pengguna nomor telepon dan data kependudukan.

Akibatnya, layanan WhatsApp tetap dapat digunakan meskipun nomor telepon yang didaftarkan sudah tidak aktif lagi. Kondisi anonymitas ini membuat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti dibuat merasa aman dalam melakukan berbagai tindak kejahatan menggunakan WhatsApp.

Sebab itu, OJK perlu mengatur pelaku usaha perbankan dan perusahaan jasa keuangan agar melakukan penyampaian informasi promosi, notifikasi dan kode OTP tidak melalui layanan WA. Tapi, memaknai layanan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan mendukung lawful intercept seperti SMS.

"Utamanya karena SMS telah diatur dalam Undang-Undang dan mendukung lawful intercept. Kebijakan ini nantinya bisa dievaluasi lagi jika sudah ada regulasi yang mengatur kerja sama WA dan operator telekomunikasi," kata Mahfud. ● mei

PENGUMUMAN PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PT BUSANA GLAMOUR PERKASA (DALAM LIKUIDASI)

Sesuai dengan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Busana Glamour Perkasa, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Perseroan"), yang berlaku pada tanggal 19 Desember 2023 (selanjutnya disebut "Keputusan Pemegang Saham"), yang keputusannya telah dinyatakan dalam akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT BUSANA GLAMOUR PERKASA, Nomor 03 tanggal 27 Desember 2023, dibuat di hadapan MARTINI WANNY Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Tangerang, telah diputuskan sejak tanggal berlakunya Keputusan Pemegang Saham dalam Keputusan Pemegang Saham antara lain (i) membubarkan Perseroan karena-memiliki hubungan dengan proses likuidasi hingga tanggal pelaksanaan pengumuman tentang berakhirnya proses likuidasi Perseroan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (2) Pasal 147 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPPT").

Perseroan selanjutnya menggunakan nama "PT BUSANA GLAMOUR PERKASA" (dalam Likuidasi) dan (ii) menunjuk tuannya CHANDRA WIJAYA sebagai Likuidator Perseroan dalam Likuidasi.

Kreditur yang akan mengajukan tagihan kepada Perseroan Dalam Likuidasi wajib menyampaikannya secara tertulis dilengkapi dengan asli bukti pendukung yang sah tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini dan dilampirkan kepada Likuidator Perseroan dalam Likuidasi pada alamat dan keterangan tersebut dibawah ini.

Pemberitahuan ini dibuat guna memenuhi ketentuan butir c ayat (2) Pasal 147 UUPPT

Jakarta, 9 Januari 2024
Likuidator
Tuan CHANDRA WIJAYA
Komplek Perkantoran Duta Merli Blok E No. 26, Jalan Gajah Mada Kav 3-5, Petojo Utara, Jakarta Pusat